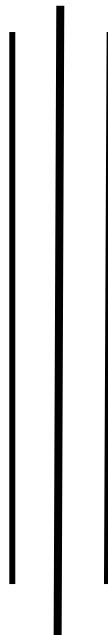




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah dan dasar surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang Tanggal 16 Nopember 2018 Nomor : 050/1371/35.07.202/2018 perihal penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, surat Surat Edaran Bupati Malang Tanggal 1 Maret 2019 Nomor : 050/7534/35.07.202/2019 perihal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan surat Edaran Bupati Malang Tanggal 8 Pebruari 2019 Nomor : 050/1466/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana

lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan

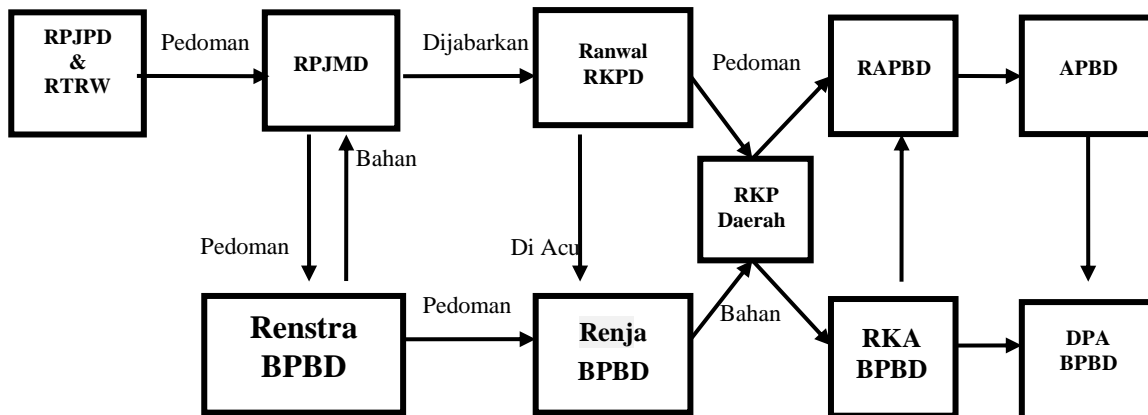
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator

kinerja, dan penyerapan anggaran. Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2020 dimana RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Renja BPBD Kabupaten Malang selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 7 Bupati Malang yaitu Memperkokoh kesadaran dan prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
 28. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
 29. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/963/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/676/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 30. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/322/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 :

- 1) Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2020 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- 4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 :

- 1) Terwujudnya dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi

acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2020;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis BPBD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2018-2019 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018-2019 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 dikatakan mengalami keberhasilan antara lain :

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan antara lain

A. Pada Indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 77%, tercapai 77% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (33 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 100% dapat dikatakan **berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dengan kegiatan :

1. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

1.1 Pemantauan dan penyebaran informasi kebencanaan dilaksanakan di 33 wilayah sebagai berikut :

- a. Bulan Januari : 2 wilayah di Kecamatan Pujon dan Kecamatan Kasembon;
- b. Bulan Maret : 1 wilayah di Kecamatan Sumbermanjingwetan;
- c. Bulan Juli : 5 wilayah di Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Pujon;
- d. Bulan Agustus : 3 wilayah di Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur, kecamatan Sumbermanjingwetan;
- e. Bulan Oktober : 7 wilayah di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pujon, Kecamatan

Tumpang, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Lawang;

f. Bulan November : 3 wilayah di Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Jabung; dan

g. Bulan Desember : 11 wilayah di Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Ngnatang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kecamatan gedangan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tajinan.

1.2 Pengurangan Resiko Bencana.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Mei 2018 bertempat di Hotel Solaris Karanglo Malang yang dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD terkait bencana di Kabupaten Malang, Polres Malang, Kodim 0818, PMI Kabuptaen Malang, Bank Jatim, PLN, Telkom dan Perwakilan Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan tirtoyudi serta Relawan dan Perwakilan Dunia Usaha. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun Dokumen Review Rencana Kontinjensi Gunung Api yang disusun oleh CV. Irama Tembang Elok.

1.3 Mitigasi Non struktural

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2018 yang bertempat di Hotel Solaris Singosari dan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari 33 Kasie Trantib se-Kabupaten Malang, BPBD dan USAID yaitu dilakukan Penyusunan Peta Rawan Bencana. Pada tanggal 12 November 2018 bertempat di Hotel Solaris Singosari Malang yang dihadiri oleh 40 orang yaitu Camat se-Kabupaten Malang, BPBD dan USAID dengan Penyerahan Peta Rawan Bencana dan Pendampingan Penyusunan Anggaran Desa untuk Kebencanaan.

1.4 Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH) dilaksanakan di 28 Sekolah sebagai berikut :

a. Bulan Februari : 4 Sekolah yaitu SD 1 Ngebruk Kecamatan Sumberpucung, SD 2 Duwet Krajan Kecamatan Tumpang, SD 1 Wonorejo Kecamatan Singosari, MA Muh Said Kecamatan Kepanjen;

b. Bulan Maret : SD 1 Bangelan Kecamatan Wonosari;

- c. Bulan April : SD Tumpakrejo Kecamatan Gedangan;
- d. Bulan Mei : SMP 4 Ampelgading Kecamatan Ampelgading, Argoyuwono,
- e. Bulan Juli : SMA Kristen Pujiharjo, SDN Ngantru 1, SDN Putukrejo, SDN 2 Ngantru, SDN 3 Ngantru, MA Roudhotul Ulum Putukrejo;
- f. Bulan Agustus : MTs Al Hidayah Pandansari Poncokusumo, SDN I Jatikerto, SDN 1 Krebbe, SDN 1 Ngebruk, SDN 1 Pandansari Kecamatan Poncokusumo, SDN 3
- g. Bulan September : MI Roudhotul Jannah Kecamatan Jabung, SDN 1 Kemantren Kecamatan , SDN 1 Senggreng Kecamatan Sumberpucung, SDN 1 Tangkilsari;
- h. Bulan Desember : SDN 3 Pandansari Kecamatan Ngantang, SDN 4 Sidoluhur, SMK Muhammadiyah Kecamatan Kepanjen, SMPN Satu Atap Kecamatan Lawang.

1.5 Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Dokumen Standar Kepuasan Masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelayanan BPBD terhadap masyarakat terdampak bencana yang meliputi 420 responden yaitu Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, Desa Langlang Kecamatan Singosari, Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo dan Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 97,8 yang berarti mutu layanan A dan kinerja unit layanan sangat baik.

2. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

- a. Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Srigonco Kecamatan Bantur pada 20 s/d 23 Maret 2018; Desa Ngantru Kecamatan Ngantang pada 18 s/d 21 Juli 2018 dan Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang pada 24 s/d 27 September 2018. Dalam setiap kegiatan pelatihan dihadiri tim pokja destana sebanyak 25 orang dan peserta gladi lapang sebanyak 175 orang.
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian :
 - a. Kaos, Topi dan Tas Ransel sebanyak 175 paket

- b. Rambu-rambu jalur evakuasi sebanyak 45 unit
 - c. Printer sebanyak 3 unit
 - d. Printer scan sebanyak 1 unit
 - e. Audio visual sebanyak 1 set
 - f. Pembuatan Vidio Dokumenter kebencanaan sebanyak 1 paket
- c. Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 25 November 2018 di Spencer Green Hotel, Jl. Raya Punten No. 86 Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari BPBD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPKPCK, DPU Binamarga, DPU SDA, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, RSUD Kanjuruhan dan Satpol PP. Selain itu juga dilaksanakan piket kesiapsiagaan bencana yang terdiri dari 4 orang tiap harinya yaitu 2 orang BPBD dan 2 orang relawan selama 365 hari dimulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2018 di kantor BPBD Kabupaten Malang.
- d. Mitigasi Struktural
Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei s/d 7 Juni 2018 di Pantai Tamban Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan dengan membangun tembok penahan gelombang air laut sepanjang 50 meter.
- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a. Penyebarluasan informasi tentang kebencanaan terhadap semua lapisan masyarakat, lintas lembaga dan organisasi;
 - b. Sinergitas antara masyarakat, lintas lembaga, lintas organisasi dan lintas OPD dalam pengelolaan Penanggulangan Bencana;
 - c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka perencanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan informasi kebencanaan terhadap akademisi dan dunia usaha;

- b. Melakukan pendampingan kepada desa-desa dalam rangka pembentukan desa tangguh bencana (Destana) secara mandiri;
- c. Penambahan sarana prasarana dan rambu-rambu informasi Penanggulangan Bencana.

B. Pada Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 71 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 71 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan **sangat berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana, dengan indikator :

1.1 Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada tanggal 14 s/d 16 November 2018 bertempat di Hotel Solaris Singosari Malang yang dihadiri oleh 53 orang peserta yang terdiri dari Kasie Trantib Kecamatan se-Kabupaten Malang dan OPD terknis terkait yaitu DPU Binamarga, DPU SDA, DPKPCK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dishub, BMKG, TNI POLRI (Polres dan Kodim). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan pemahaman mengenai Sistem Komando Darurat Bencana sehingga ketika ada kejadian bencana sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan agar tidak terjadi.

1.2 Penanganan Darurat Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tahun 2018 sebanyak 76 kejadian bencana yang telah ditangani, antara lain : Tanah longsor sebanyak 33 kejadian, Angin Kencang dan Angin Putting Beliung sebanyak 20 kejadian, Pohon Tumbang sebanyak 7 kejadian, Kekeringan sebanyak 8 kejadian.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar logistik dan Peralatan Bencana, dengan indikator :

2.1 Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan buffer stock sembako dan alat pergudangan meliputi pengadaan 400 paket sembako untuk korban bencana, Pengadaan Rak peralatan sebanyak 1 unit, pengadaan Rak Logistik sebanyak 2 unit dan Locker sebanyak 1 unit.

2.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah pada tanggal 2 s/d 3 Agustus 2018 di Hotel Solaris, Singosari Malang yang dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Kasie Trantib Kecamatan se-Kabupaten Malang dan OPD terknis terkait yaitu DPU Binamarga, DPU SDA, DPKPCK, Dinas Sosial, BMKG, TNI POLRI (Polres dan Kodim). Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai sistem penanggulangan bencana di daerah bagi aparatur dan bisa melaksanakan penanganan bencana secara mandiri.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a. Adanya sarana prasarana dan ketersediaan logistik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan pemberian informasi kebencanaan;
 - c. Dukungan lintas lembaga organisasi, potensi masyarakat dan dunia usaha dalam Penanggulangan Bencana.

- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pencukupan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana untuk meminimalisasi jumlah korban;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pengelolaan penanggulangan bencana;
 - c. Meningkatkan sinergitas antara masyarakat, lintas lembaga dan lintas organisasi penanganan bencana.

C. Pada Indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan target 81% tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan, Capaian 81% dapat dikatakan **berhasil** kegiatan ini didukung oleh Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana dengan kegiatan :

1. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

1.1 Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana.

Kegiatan Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana melalui Peningkatan Nilai Ekonomi Tanaman Kopi di Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang pada tanggal 12 s/d 13 September 2018 yang diikuti oleh 30 orang terdiri dari BPBD, Kader PKK, Karang Taruna, Petani Kopi dan Masyarakat Desa setempat. Diharapkan peserta paham tentang cara peningkatan nilai ekonomi tanaman kopi dan dapat meningkatkan kesejahteraan pasca bencana dari nilai ekonomi tanaman kopi sebagai produk unggulan desa.

1.2 SDM Paham Pendampingan Psikososial

Kegiatan ini dilaksanakan berupa Pelatihan Pendampingan Psikososial Pasca Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2018 bertempat di Syariah Radho Hotel Sengkaling yang dihadiri oleh 30 orang yang terdiri dari personil desa yang membidangi kebencanaan dari Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Desa Pait Kecamatan Kasembon, desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo, Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo, Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading, Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan, Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan, Desa Mangliawan Kecamatan Pakis dan Desa Wonorejo Kecamatan Singosari. Diharapkan peserta paham akan pentingnya pemulihan non fisik pasca bencana khususnya dalam hal psikososial sehingga pada pasca bencana dapat melakukan pertolongan pertama terhadap psikososial para penyintas di daerahnya masing-masing.

1.3 Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun Dokumen Kajian Sosial Ekonomi di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan pada 11 Mei s/d 4 Juni 2018 yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yaitu CV. Irama Tembang Elok dengan melakukan survey lapangan, wawancara sebagai database untuk penghitungan

Kajian Kebutuhan Pasca Bencana. Dokumen Dapat menjadi acuan awal untuk penghitungan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana.

2. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

2.1 Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Sosialisasi Rumah Panel Tahan Gempa yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 Juli 2018 bertempat di Hotel Solaris Karanglo Malang yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta terdiri dari BPBD, DPKPCK, Perangkat Kecamatan terdampak se-Kabupaten Malang. Kegiatan ini dimaksudkan agar perangkat kecamatan paham dan mengetahui adanya rumah panel tahan gempa dan dapat ditularkan kepada masyarakat kecamatan dan diharapkan masyarakat antusias untuk menjadi perintis warga yang menggunakan rumah ramah bencana sehingga kedepannya masyarakat sekitar lainnya paham serta mau membangun rumah ramah dan aman bencana. Sedangkan untuk mewujudkan rumah panel tahan gempa diadakan pengadaan alat cetak rumah panel dan pelatihan pembuatan rumah panel pada bulan oktober s/d November 2018 yang bertempat di Halaman Belakang Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang diikuti oleh personil BPBD dan relawan BPBD.

2.2 Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kegiatan ini dilaksanakan Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tanggal 30 s/d 31 Oktober 2018 bertempat di Hotel Solaris Karanglo Malang yang dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari BPBD, DPKPCK, DPU Binamarga, DPU SDA, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disperindagsar, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Jitupasna sebagai data dasar penyusunan Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Keterlibatan perangkat daerah teknis dalam penyusunan ini sebagai pihak pemangku kepentingan dalam

pengajuan anggaran kegiatan selama dalam kurun waktu pasca bencana. Setelah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi disusun maka dilakukan uji publik tidak hanya untuk perangkat daerah dan daerah terdampak tetapi pihak dunia usaha sebagai wujud kepedulian dalam proses penanganan pasca bencana berbasisi pengurangan resiko bencana.

2.3 Desa Siap Kelola Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kegiatan sinkronisasi sistem Kebencanaan pada tanggal 20 Maret 2018 di Hotel Mirabell Kepanjen yang diikuti oleh 25 orang terdiri dari BPBD, Fasilitator SID dan Diskominfo. Pada intinya antara DPDB, Diskominfo, Dispendukcapil serta DPMD perlu duduk bersama untuk keberlanjutan integrasi Sisitem Informasi Desa (SID) pada Website Desa. Namun pada akhirnya menemukan jalan buntu karena Diskominfo tidak pernah menindaklanjuti padahal ada disposisi Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti dan untuk dilaksanakan sehingga website Desa tersendat. Untuk itu pada tahun berikutnya BPBD akan membangun kembali Sistem Informasi desa (SID) sebagai data dasar pembangunan Bidang Data. BPBD Kabupaten Malang akan melakukan terobosan baru melalui fasilitator SID dengan menyewa server agar SID dapat online dan dapat updating data.

2.4 SDM Pahami Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA).

Kegiatan dilakukan dengan menggelar Workshop Manajemen Bencana pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2018 bertempat di Hotel Mirabell Kepanjen yang dihadiri oleh 20 orang terdiri dari BPBD, DPKPCK, DPU Binamarga, DPU SDA, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disperindagsar, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Maksud kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang penghitungan kebutuhan pasca bencana. Diharapkan pada saat bencana dan pasca bencana, Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana paham tentang proses penyusunan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a. Adanya sistem informasi desa yang memuat tentang data pengelolaan penanggulangan bencana;
 - b. Adanya percontohan rumah panel tahan gempa;
 - c. Sinergitas lintas OPD dalam perencanaan pasca bencana.

- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan informasi dan sosialisasi SID di semua wilayah Kabupaten Malang;
 - b. Melakukan pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana di wilayah rawan bencana.

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanggulangan bencana secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, simulasi/gladi lapang dan lainnya.
- b. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk gotong royong dengan masyarakat.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggungan Bencana, Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya

penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - a. Kegiatan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana;
 - b. Kegiatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana :
 - a. Kegiatan Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. Kegiatan Pemenuhan Dasar Logistik Dan Peralatan Bencana;
8. Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana :
 - a. Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - b. Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekontruksi Pasca Bencana;

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk :

- a. Peningkatan Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- b. Umpan Balik Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Kegiatan Rencana Pengurangan Resiko Bencana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana, Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2018 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (tahun lalu/n2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra, Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Urusan									
	Bidang Urusan									
4.406.31.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%		100%	100%		
4.406.31.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	14.828 Surat	2.863 Surat	2.525 Surat	2.734 Surat	108%	2.525 Surat	5.597 Surat	44,85%
		Outcome : Cakupan Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	14.828 Surat	2.863 Surat	2.525 Surat	2.734 Surat	108%	2.525 Surat	5.597 Surat	44,85%
4.406.31.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	240 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	100%	36 Rekening	72 Rekening	40%
		Outcome : Cakupan Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	240 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	100%	36 Rekening	72 Rekening	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (tahun lalu/n2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra, Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.406.31.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output: Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	583 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	100%	23 Orang	278 Orang	80,81%
		Outcome : Cakupan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	583 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	100%	23 Orang	278 Orang	80,81%
4.406.31.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Jumlah Petugas Kebersihan	28 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang	1 Orang	81,25%
		Outcome : Cakupan Petugas Kebersihan	28 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang	24 Orang	85,71%
4.406.31.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	2.709 Paket	51 Jenis	51 Jenis	51 Jenis	100%	51 Jenis	1.488 Jenis	92,47%
		Outcome : Cakupan Alat Tulis Kantor yang Disediakan	2.709 Paket	51 Jenis	51 Jenis	51 Jenis	100%	51 Jenis	1.488 Jenis	92,47%
4.406.31.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan	6.113 Paket	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	4.627 Jenis	99,21%
		Outcome : Cakupan Barang Cetakan yang Disediakan	6.113 Paket	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	4.627 Jenis	99,21%
4.406.31.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik	245 Paket	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	105 Jenis	71,43%
		Outcome : Cakupan Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik	245 Paket	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	105 Jenis	71,43%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (tahun lalu/n2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra, Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.406.31.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.285 Exsemplar	3 Jenis	3 Jenis	23 Jenis	100%	3 Jenis	2.250 Jenis	91,96%
		Outcome : Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.285 Exsemplar	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	2.025 Jenis	91,96%
4.406.31.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan	5.910 Pack	1.050 Pack	1.050 Pack	1.103 Pack	100%	1.050 Pack	2.025 Pack	71,43%
		Outcome : Cakupan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan	5.910 Pack	1.050 Pack	1.050 Pack	1.103 Pack	100%	1.050 Pack	2.025 Pack	71,43%
4.406.31.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Output : Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah	750 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	100%	13 Orang	110 Orang	180,25%
		Outcome : Cakupan Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Luar Daerah	750 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	100%	13 Orang	110 Orang	180,25%
4.406.31.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Output : Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah	746 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang	334 Orang	88,36%
		Outcome : Cakupan Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah	746 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang	334 Orang	88,36%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (tahun lalu/n2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra, Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.406.31.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)					100%			
4.406.31.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Jumlah Rutin gedung kantor yang dipelihara	64 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	100%	16 Jenis	16 Jenis	100%
		Outcome : Cakupan Pemeliharaan rutin gedung kantor yang dipelihara	64 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	100%	16 Jenis	16 Jenis	100%
4.406.31.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	67 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	17 Unit	46 Unit	48,66%
		Outcome : Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	67 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	17 Unit	46 Unit	48,66%
4.406.31.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	23 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	8 Unit	34,78%
		Outcome : Cakupan Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	23 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	8 Unit	34,78%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.406.31.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Output : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	219 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	150 Jenis	68,49%
		Outcome : Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	219 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	150 Jenis	68,49%
4.406.31.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Output : Jumlah Mebeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala	55 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	46 Jenis	83,64%
		Outcome : Cakupan Mebeleur yang Dipelihara Rutin/Berkala	55 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	46 Jenis	83,64%
4.406.31.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)					100 %			
4.406.31.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Output : Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	386 Stel	80 Stel	80 Stel	80 Stel	100%	80 Stel	113 Stel	32,01%
		Outcome : Cakupan Penyediaan Pakaian Dinas	386 Stel	80 Stel	80 Stel	80 Stel	100%	80 Stel	113 Stel	32,01%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1) Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.406.31.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)								
4.406.31.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	63 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	100%	12 Orang	25 Orang	163,32%
		Outcome : Cakupan Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	63 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	100%	12 Orang	25 Orang	163,32%
4.406.31.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)					100%			
4.406.31.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Output : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/SKM)	35 Buku	7 Buku	7 Buku	7 Buku	100%	7 Buku	13 Buku	37,14%
		Outcome : Cakupan Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/SKM)	35 Buku	7 Buku	7 Buku	7 Buku	100%	7 Buku	13 Buku	37,14%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.406.31.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	2 Buku	40,00%
		Outcome : Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	2 Buku	40,00%
4.406.31.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	2 Buku	40,00%
		Outcome : Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Akhir	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	2 Buku	40,00%
4.406.31.07	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					99,36%			
4.406.31.07.01	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Output : Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi Potensi Bencana	132 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	100%	33 Wilayah	66 Wilayah	100%
		Outcome : Cakupan pemantauan dan penyebarluasan informasi Potensi Bencana	132 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	100%	33 Wilayah	66 Wilayah	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Output : Jumlah rencana pengurangan resiko bencana	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
		Outcome : Cakupan rencana pengurangan resiko bencana	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
		Output : Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	103 Sekolah	28 Sekolah	28 Sekolah	28 Sekolah	100%	28 Sekolah	28 Sekolah	27,18%
		Outcome : Cakupan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	103 Sekolah	28 Sekolah	28 Sekolah	28 Sekolah	100%	28 Sekolah	28 Sekolah	27,18%
		Output : Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Outcome : Cakupan Dokumen Kajian Resiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Output : Jumlah Dokumen SKM Pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Malang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Output : Jumlah Dokumen SKM Pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Malang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.406.31.07.02	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Output : Jumlah Desa Tangguh Bencana	12 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	100%	3 Desa	3 Desa	25%
		Outcome : Cakupan Desa Tangguh Bencana	12 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	100%	3 Desa	3 Desa	250%
		Output : Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terbeli	700 Paket	175 Paket	175 Paket	175 Paket	100%	175 Paket	175 Paket	25%
		Outcome : Cakupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terbeli	700 Paket	175 Paket	175 Paket	175 Paket	100%	175 Paket	175 Paket	25%
		Output : Jumlah peningkatan aparatur daerah dalam penanggulangan bencana	160 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	25%
		Outcome : Cakupan peningkatan aparatur daerah dalam penanggulangan bencana	160 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Output : Panjang Tembok Penahan Ombak	200 Meter	50 Meter	50 Meter	50 Meter	100%	50 Meter	100 Meter	5%
		Outcome : Cakupan Panjang Tembok Penahan Ombak	200 Meter	50 Meter	50 Meter	50 Meter	100%	50 Meter	100 Meter	50%
4.406.31.06	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana					98,19%			
4.406.31.06.01	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah	Output : Jumlah Pelatihan Sistem Komando Bencana	173 Orang	53 Orang	53 Orang	53 Orang	100%	53 Orang	53 Orang	30,64%
		Outcome : Cakupan Pelatihan Sistem Komando Bencana	173 Orang	53 Orang	53 Orang	53 Orang	100%	53 Orang	53 Orang	30,64%
	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah	Output : Jumlah penanganan ketanggap daruratan	71 Kali	71 Kali	71 Kali	71 Kali	100%	Kali71	71 Kali	100%
		Outcome : Cakupan penanganan ketanggap daruratan	71 Kali	71 Kali	71 Kali	71 Kali	100%	71 Kali	71 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
4.406.31.06.02	Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik	Output : Jumlah ketersediaan barang logistik	1.600 Paket	400 Paket	400 Paket	400 Paket	100%	400 Paket	400 Paket	100%
		Outcome : Cakupan ketersediaan barang logistik	1.600 Paket	400 Paket	400 Paket	400 Paket	100%	400 Paket	400 Paket	100%
		Output : Jumlah peningkatan aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	25%
		Outcome : Cakupan peningkatan aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	25%
4.406.31.08	Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana	Presentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana					99,68%			
4.406.31.08.01	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca bencana	Output : Jumlah Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana	7 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Outcome : Cakupan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bancana	7 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Output : Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	120 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	25,00%
		Outcome : Cakupan SDM Paham Pendampingan Psikososial	120 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	25,00%
		Output : Jumlah Dokumen kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00%
		Outcome : Cakupan Dokumen kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00%
4.406.31.08.02	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekontruksi Pasca Bencana	Output : Jumlah Pemulihan Rekontruksi Pasca Bencana	10 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	10%
		Outcome : Cakupan Pemulihan Rekontruksi Pasca Bencana	10 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	10%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renja Program/Kegiatan 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Output : Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	14,29%
		Outcome : Cakupan Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	14,29%
		Output : Jumlah Desa Siap Kelola Data SID Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	9 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	9 Desa	9 Desa	100%
		Outcome : Cakupan Desa Siap Kelola Data SID Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	9 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	9 Desa	9 Desa	100%
		Output : Jumlah SDM Pahami JIUPASNA	120 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	120 Orang	25,00%
		Outcome : Cakupan SDM Pahami JIUPASNA	120 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	120 Orang	25,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Malang belum sepenuhnya 100%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang sebagai supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Malang. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten Malang yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Malang baru memiliki Perda No. 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Malang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Malang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017, Keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pada Indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 77%, tercapai 77% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (23 komunitas PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 100% keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.

2. Pada Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 71 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 71 kejadian) Capaian 100% keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Kesiapsiagaan Dalam menghadapi Bencana dan Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana.
3. Pada Indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan target 81% tercapai 81% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek terdampak yang ditangani di bagi dengan jumlah Data base obyek terdampak dikali 100%, Capaian 100% penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini dapat tercapai seperti yang direncanakan dikarenakan pemulihan sosial ekonomi dan pendampingan psikososial terhadap korban dampak bencana.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Esselon II : Jumlah Desa Tangguh Bencana Destana			26 Desa	29 Desa	32 Desa	35 Desa	26 Desa	29 Desa	32 Desa	35 Desa	
1.	Esselon III : Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoraan (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Esselon IV : Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar			2.525 Surat	2.525 Surat	2.600 Surat	2.625 surat	2.525 Surat	2.525 Surat	2.600 Surat	2.625 surat	
	Jumlah Rekening Pembayaran Telepon, Air dan Listrik Selama Satu Tahun			36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	
	Jumlah Orang yang Diberikan Honor Selama Satu Tahun			22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	
	Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Selama Satu Tahun			1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	
	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor			51 Jenis	51 Jenis	51 Jenis	50 Jenis	51 Jenis	51 Jenis	51 Jenis	50 Jenis	
	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan			12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	
	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik			7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	
	Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan yang Dibeli			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
	Jumlah Realisasi Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat dan Pertemuan Lainnya			1.050 Pack	1.050 Pack	1.050 Pack	1.050 Pack	720 Pack	990 Pack	1.050 Pack	1.050 Pack	
	Jumlah Penugasan Dinas Ke Luar Daerah			35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	34 Orang	35 Orang	35 Orang	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai tugas :

1. Menetapkan Pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap dan penanganan bencana,
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana,
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan,
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
Fungsi ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;
4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas; dan

Isu-isu penting yang dapat diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana;
9. Menyiapkan pelatihan keahlian bagi SDM, Tim TRC dan Tim Pusdalops.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP” yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya Misi ke 7 (tujuh) yaitu Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut:

Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (RENTRA 2020/RKPD 2019 PRAKIRAAN MAJU 2020)					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5.400.806.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				8.679.832.040,00	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	899.450.300,00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.188.608.040,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2525 Surat	8.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2625 Surat	8.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	30.768.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	52.228.440,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	23 OB	366.639.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	22 OB	440.407.000,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	28.749.600,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 Jenis	44.282.400,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 Jenis	58.941.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	46.788.400,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	63.607.000,00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	4.535.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	6.037.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	7.665.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	10.203.000,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1050 Pack	27.562.500,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1060 Pack	36.688.000,00	
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Kabupaten Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	16 Orang	171.030.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Kabupaten Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	34 Orang	250.162.000,00	
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	33 Orang	160.580.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	34 Orang	226.085.000,00	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	10 Jenis	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	17 Jenis	7.500.000,00	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	195.743.700,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	234.981.500,00	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	17 Unit	178.181.700,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	211.605.000,00	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	16 Jenis	5.342.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	16 Jenis	7.111.500,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	1.800.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	2.396.000,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	5.800.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	7.720.000,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	4.620.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	6.149.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	48.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	63.888.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	80 Stel	48.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	80 Stel	63.888.000,00	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	10.300.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	27.808.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	11 Orang	10.300.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	13 Orang	27.808.000,00	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	116.416.600,00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	156.698.500,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	8 Buku	100.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	8 Buku	139.700.000,00	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	5.819.600,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	8.013.500,00	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	10.597.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	8.985.000,00	
VI	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penanganan Bencana (%)	100%	1.885.286.100,00	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penanganan Bencana (%)	100%	3.301.738.000,00	
1	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	60 Orang	101.641.000,00	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40 Orang	133.100.000,00	
		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Penanganan Kedaruratan	71 Kali	1.143.221.200,00		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Penanganan Kedaruratan	51 Kali	2.406.448.000,00	
		BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	1 Tim	336.505.200,00		BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	1 Tim	442.200.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	192.228.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	400 Paket	200.200.000,00	
		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	60 Orang	111.690.700,00		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	50 Orang	119.790.000,00	
VII	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	83%	1.485.511.000,00	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	85%	1.960.944.000,00	
1	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	107.768.000,00	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	107.545.000,00	
		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen	125.000.000,00		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen	133.100.000,00	
		SD/SMP di Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	28 Sekolah	120.000.000,00		SD/SMP di Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	25 Sekolah	119.790.000,00	
		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	1 Paket	130.000.000,00		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	1 Paket	139.568.000,00	
		Sekolah/Madrasah di Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	4 Sekolah/Madrasah	200.000.000,00		Sekolah/Madrasah di Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	4 Sekolah/Madrasah	159.500.000,00	
2	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Desa Tangguh Bencana	4 Desa	200.000.000,00	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	177.848.000,00	
		BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	50 Paket	95.000.000,00		BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	175 Paket	236.165.000,00	
		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Piket Kesiapsiagaan Bencana	40 Orang	100.000.000,00		Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Piket Kesiapsiagaan Bencana	40 Orang	383.860.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wilayah Kabuapten Malang	Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	50 Meter	135.734.400,00		Wilayah Kabuapten Malang	Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	50 Meter	153.568.000,00	
		BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk	1 Unit	272.008.600,00		BPBD Kabupaten Malang	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk	1 Unit	350.000.000,00	
VIII	PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA		Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	87%	760.099.000,00	PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA		Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	90%	1.745.166.000,00	
1	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan	130.000.000,00	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan	93.500.000,00	
		Kabupaten Malang	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	70.000.000,00		Kabupaten Malang	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	71.533.000,00	
		Kabupaten Malang	Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	1 Dokumen	65.000.000,00		Kabupaten Malang	Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	1 Dokumen	67.836.000,00	
2	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Unit	115.952.900,00	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	3 Unit	605.000.000,00	
		Kabupaten Malang	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Dokumen	166.787.300,00		Kabupaten Malang	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2 Dokumen	332.200.000,00	
		Kabupaten Malang	Jumlah SDM Paham JITU PASNA	30 Orang	118.973.800,00		Kabupaten Malang	Jumlah SDM Paham JITU PASNA	30 Orang	242.347.000,00	
		Kabupaten Malang	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	93.385.000,00		Kabupaten Malang	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	332.750.000,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim**, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;**
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;**
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi BNPB adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;

5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Disaster Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPB adalah :

1. Program Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana;
dengan kegiatan :
 - a. Mitigasi Struktural;
 - b. Mitigasi Non Struktural;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
 - d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
2. Program Penanganan Darurat Bencana;
dengan kegiatan :
 - a. Tanggap darurat di daerah terkena bencana;
 - b. Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana;
 - c. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana;
 - d. Penanganan pengungsi akibat bencana.
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
dengan kegiatan :
 - a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana;
 - c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana.
4. Program Peralatan dan logistik;
dengan kegiatan :
 - a. Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana;
 - b. Penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana.
5. Program Data, Informasi dan Humas.
dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasarana dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan indikator :

1. Persentase jumlah korban bencana yang berhasil diselamatkan;
2. Persentase fasilitas umum dan sarana prasarana yang berhasil dioperasikan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang

- berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana, Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana, Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana, Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana dan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana terutama untuk perempuan, dimana Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial yang berbeda. Peran sosial yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5.400.806.700,00			8.679.832.040,00	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.400.806.700,00			8.679.832.040,00	
4,406	FUNGSI LAINNYA				5.400.806.700,00			8.679.832.040,00	
4.406.31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5.400.806.700,00			8.679.832.040,00	
4.406.31.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	899.450.300,00			100%	1.188.608.040,00
4.406.31.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	BPBD Kabupaten Malang	2525 Surat	8.000.000,00	APBD Kabupaten		2625 Surat	8.000.000,00
4.406.31.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	BPBD Kabupaten Malang	36 Rekening	30.768.000,00	APBD Kabupaten		36 Rekening	52.228.440,00
4.406.31.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	BPBD Kabupaten Malang	23 OB	366.639.000,00	APBD Kabupaten		22 OB	440.407.000,00
4.406.31.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	BPBD Kabupaten Malang	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten		1 OB	28.749.600,00
4.406.31.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	BPBD Kabupaten Malang	51 Jenis	44.282.400,00	APBD Kabupaten		51 Jenis	58.941.000,00
4.406.31.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	BPBD Kabupaten Malang	12 Jenis	46.788.400,00	APBD Kabupaten		12 Jenis	63.607.000,00
4.406.31.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	BPBD Kabupaten Malang	7 Jenis	4.535.000,00	APBD Kabupaten		7 Jenis	6.037.000,00
4.406.31.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	3 Jenis	7.665.000,00	APBD Kabupaten		3 Jenis	10.203.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.31.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	BPBD Kabupaten Malang	1050 Pack	27.562.500,00	APBD Kabupaten		1060 Pack	36.688.000,00
4.406.31.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Luar Kabupaten Malang	16 Orang	171.030.000,00	APBD Kabupaten		34 Orang	250.162.000,00
4.406.31.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Wilayah Kabupaten Malang	33 Orang	160.580.000,00	APBD Kabupaten		34 Orang	226.085.000,00
4.406.31.01.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	10 Jenis	10.000.000,00	APBD Kabupaten		17 Jenis	7.500.000,00
4.406.31.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	195.743.700,00			100%	234.981.500,00
4.406.31.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	BPBD Kabupaten Malang	17 Unit	178.181.700,00	APBD Kabupaten		7 Unit	211.605.000,00
4.406.31.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	16 Jenis	5.342.000,00	APBD Kabupaten		16 Jenis	7.111.500,00
4.406.31.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	5 Unit	1.800.000,00	APBD Kabupaten		5 Unit	2.396.000,00
4.406.31.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	1 Jenis	5.800.000,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	7.720.000,00
4.406.31.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	3 Jenis	4.620.000,00	APBD Kabupaten		3 Jenis	6.149.000,00
4.406.31.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	48.000.000,00			100%	63.888.000,00
4.406.31.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	BPBD Kabupaten Malang	80 Stel	48.000.000,00	APBD Kabupaten		80 Stel	63.888.000,00
4.406.31.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	10.300.000,00			100%	27.808.000,00
4.406.31.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	11 Orang	10.300.000,00	APBD Kabupaten		13 Orang	27.808.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.31.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	116.416.600,00			100%	156.698.500,00
4.406.31.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	BPBD Kabupaten Malang	8 Buku	100.000.000,00	APBD Kabupaten		8 Buku	139.700.000,00
4.406.31.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	BPBD Kabupaten Malang	1 Buku	5.819.600,00	APBD Kabupaten		1 Buku	8.013.500,00
4.406.31.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	BPBD Kabupaten Malang	1 Buku	10.597.000,00	APBD Kabupaten		1 Buku	8.985.000,00
4.406.31.06	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana (%)		100%	1.885.286.100,00			100%	3.301.738.000,00
4.406.31.06.01	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	Wilayah Kabupaten Malang	60 Orang	101.641.000,00	APBD Kabupaten		40 Orang	133.100.000,00
		Jumlah Penanganan Kedaruratan	Wilayah Kabupaten Malang	71 Kali	1.143.221.200,00	APBD Kabupaten		51 Kali	2.406.448.000,00
		Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	BPBD Kabupaten Malang	1 Tim	336.505.200,00	APBD Kabupaten		1 Tim	442.200.000,00
4.406.31.06.02	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	BPBD Kabupaten Malang	600 Paket	192.228.000,00	APBD Kabupaten		400 Paket	200.200.000,00
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	60 Orang	111.690.700,00	APBD Kabupaten		50 Orang	119.790.000,00
4.406.31.07	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		83%	1.485.511.000,00			85%	1.960.944.000,00
4.406.31.07.01	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	33 Wilayah	107.768.000,00	APBD Kabupaten		33 Wilayah	107.545.000,00
		Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	1 Dokumen	125.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	133.100.000,00
		Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	SD/SMP di Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Malang	28 Sekolah	120.000.000,00	APBD Kabupaten		25 Sekolah	119.790.000,00
		Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Malang	1 Paket	130.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Paket	139.568.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	Sekolah/Madrasah di Wilayah Kabupaten Malang	4 Sekolah/Madrasah	200.000.000,00	APBD Kabupaten		4 Sekolah/Madrasah	159.500.000,00
4.406.31.07.02	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	4 Desa	200.000.000,00	APBD Kabupaten		3 Desa	177.848.000,00
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD Kabuapten Malang	50 Paket	95.000.000,00	APBD Kabupaten		175 Paket	236.165.000,00
		Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Piket Kesiapsiagaan Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	40 Orang	100.000.000,00	APBD Kabupaten		40 Orang	383.860.000,00
		Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	Wilayah Kabuapten Malang	50 Meter	135.734.400,00	APBD Kabupaten		50 Meter	153.568.000,00
		Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk	BPBD Kabupaten Malang	1 Unit	272.008.600,00	APBD Kabupaten		1 Unit	350.000.000,00
4.406.31.08	PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)		87%	760.099.000,00			90%	1.745.166.000,00
4.406.31.08.01	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	2 Kegiatan	130.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	93.500.000,00
		Jumlah SDM Pahami Pendampingan Psikososial	Kabupaten Malang	30 Orang	70.000.000,00	APBD Kabupaten		30 Orang	71.533.000,00
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Kabupaten Malang	1 Dokumen	65.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	67.836.000,00
4.406.31.08.02	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	1 Unit	115.952.900,00	APBD Kabupaten		3 Unit	605.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kabupaten Malang	1 Dokumen	166.787.300,00	APBD Kabupaten		2 Dokumen	332.200.000,00
		Jumlah SDM Pahami JITU PASNA	Kabupaten Malang	30 Orang	118.973.800,00	APBD Kabupaten		30 Orang	242.347.000,00
		Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	Kabupaten Malang	40 Orang	93.385.000,00	APBD Kabupaten		40 Orang	332.750.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 8 program dan 31 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Penyediaan Makanan Dan Minuman;
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
 - l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam dengan kegiatan :
 - a. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana;
 - b. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.
7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan :
 - a. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana;
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana.
8. Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Pasca Bencana dengan kegiatan :
 - a. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - b. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana.

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana terutama untuk perempuan dimana Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial yang dikonstruksikan secara berbeda, peran sosial yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
Pagu Indikatif Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5.400.806.700,00				8.679.832.040,00
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.400.806.700,00				8.679.832.040,00
	FUNGSI LAINNYA				5.400.806.700,00				8.679.832.040,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5.400.806.700,00				8.679.832.040,00
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	899.450.300,00			100%	1.188.608.040,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	BPBD Kabupaten Malang	2525 Surat	8.000.000,00	APBD Kabupaten		2625 Surat	8.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	BPBD Kabupaten Malang	36 Rekening	30.768.000,00	APBD Kabupaten		36 Rekening	52.228.440,00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	BPBD Kabupaten Malang	23 OB	366.639.000,00	APBD Kabupaten		22 OB	440.407.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	BPBD Kabupaten Malang	1 OB	21.600.000,00	APBD Kabupaten		1 OB	28.749.600,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	BPBD Kabupaten Malang	51 Jenis	44.282.400,00	APBD Kabupaten		51 Jenis	58.941.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	BPBD Kabupaten Malang	12 Jenis	46.788.400,00	APBD Kabupaten		12 Jenis	63.607.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	BPBD Kabupaten Malang	7 Jenis	4.535.000,00	APBD Kabupaten		7 Jenis	6.037.000,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	3 Jenis	7.665.000,00	APBD Kabupaten		3 Jenis	10.203.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	BPBD Kabupaten Malang	1050 Pack	27.562.500,00	APBD Kabupaten		1060 Pack	36.688.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Luar Kabupaten Malang	16 Orang	171.030.000,00	APBD Kabupaten		34 Orang	250.162.000,00
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Wilayah Kabupaten Malang	33 Orang	160.580.000,00	APBD Kabupaten		34 Orang	226.085.000,00
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	10 Jenis	10.000.000,00	APBD Kabupaten		17 Jenis	7.500.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	195.743.700,00			100%	234.981.500,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	BPBD Kabupaten Malang	17 Unit	178.181.700,00	APBD Kabupaten		7 Unit	211.605.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	16 Jenis	5.342.000,00	APBD Kabupaten		16 Jenis	7.111.500,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	5 Unit	1.800.000,00	APBD Kabupaten		5 Unit	2.396.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	1 Jenis	5.800.000,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	7.720.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	BPBD Kabupaten Malang	3 Jenis	4.620.000,00	APBD Kabupaten		3 Jenis	6.149.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	48.000.000,00			100%	63.888.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	BPBD Kabupaten Malang	80 Stel	48.000.000,00	APBD Kabupaten		80 Stel	63.888.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	10.300.000,00			100%	27.808.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	11 Orang	10.300.000,00	APBD Kabupaten		13 Orang	27.808.000,00
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	116.416.600,00			100%	156.698.500,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	BPBD Kabupaten Malang	8 Buku	100.000.000,00	APBD Kabupaten		8 Buku	139.700.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	BPBD Kabupaten Malang	1 Buku	5.819.600,00	APBD Kabupaten		1 Buku	8.013.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	BPBD Kabupaten Malang	1 Buku	10.597.000,00	APBD Kabupaten		1 Buku	8.985.000,00
VI	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana (%)		100%	1.885.286.100,00			100%	3.301.738.000,00
1	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	Wilayah Kabupaten Malang	60 Orang	101.641.000,00	APBD Kabupaten		40 Orang	133.100.000,00
		Jumlah Penanganan Kedaruratan	Wilayah Kabupaten Malang	71 Kali	1.143.221.200,00	APBD Kabupaten		51 Kali	2.406.448.000,00
		Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	BPBD Kabupaten Malang	1 Tim	336.505.200,00	APBD Kabupaten		1 Tim	442.200.000,00
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	BPBD Kabupaten Malang	600 Paket	192.228.000,00	APBD Kabupaten		400 Paket	200.200.000,00
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	60 Orang	111.690.700,00	APBD Kabupaten		50 Orang	119.790.000,00
VII	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		83%	1.485.511.000,00			85%	1.960.944.000,00
1	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	33 Wilayah	107.768.000,00	APBD Kabupaten		33 Wilayah	107.545.000,00
		Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	1 Dokumen	125.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	133.100.000,00
		Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	SD/SMP di Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Malang	28 Sekolah	120.000.000,00	APBD Kabupaten		25 Sekolah	119.790.000,00
		Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Malang	1 Paket	130.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Paket	139.568.000,00
		Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	Sekolah/Madrasah di Wilayah Kabupaten Malang	4 Sekolah/Madrasah	200.000.000,00	APBD Kabupaten		4 Sekolah/Madrasah	159.500.000,00
2	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	4 Desa	200.000.000,00	APBD Kabupaten		3 Desa	177.848.000,00
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD Kabuapten Malang	50 Paket	95.000.000,00	APBD Kabupaten		175 Paket	236.165.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Picket Kesiapsiagaan Bencana	Wilayah Kabupaten Malang	40 Orang	100.000.000,00	APBD Kabupaten		40 Orang	383.860.000,00
		Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	Wilayah Kabuapten Malang	50 Meter	135.734.400,00	APBD Kabupaten		50 Meter	153.568.000,00
		Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk	BPBD Kabupaten Malang	1 Unit	272.008.600,00	APBD Kabupaten		1 Unit	350.000.000,00
VIII	PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)		87%	760.099.000,00			90%	1.745.166.000,00
1	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	2 Kegiatan	130.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	93.500.000,00
		Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	Kabupaten Malang	30 Orang	70.000.000,00	APBD Kabupaten		30 Orang	71.533.000,00
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Kabupaten Malang	1 Dokumen	65.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	67.836.000,00
2	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	1 Unit	115.952.900,00	APBD Kabupaten		3 Unit	605.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kabupaten Malang	1 Dokumen	166.787.300,00	APBD Kabupaten		2 Dokumen	332.200.000,00
		Jumlah SDM Paham JITU PASNA	Kabupaten Malang	30 Orang	118.973.800,00	APBD Kabupaten		30 Orang	242.347.000,00
		Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	Kabupaten Malang	40 Orang	93.385.000,00	APBD Kabupaten		40 Orang	332.750.000,00

TABEL 4.2**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5.400.806.700,00					
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.400.806.700,00					
	FUNGSI LAINNYA			5.400.806.700,00					
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			5.400.806.700,00					
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	899.450.300,00					
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2525 Surat	8.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	30.768.000,00	25%	25%	25%	25%	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	23 OB	366.639.000,00	25%	25%	25%	25%	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	25%	25%	25%	25%	
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 Jenis	44.282.400,00	25%	25%	25%	25%	
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	46.788.400,00	25%	25%	25%	25%	
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	4.535.000,00	25%	25%	25%	25%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	7.665.000,00	25%	25%	25%	25%	
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1050 Pack	27.562.500,00	25%	25%	25%	25%	
1.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	16 Orang	171.030.000,00	25%	30%	20%	25%	
1.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	33 Orang	160.580.000,00	25%	30%	20%	25%	
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	10 Jenis	10.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	195.743.700,00					
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	17 Unit	178.181.700,00	25%	25%	25%	25%	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	16 Jenis	5.342.000,00	25%	25%	25%	25%	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	1.800.000,00		50%		50%	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	5.800.000,00	25%	25%	25%	25%	
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	4.620.000,00	25%	25%	25%	25%	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	48.000.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	80 Stel	48.000.000,00		100%			
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	10.300.000,00					
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	11 Orang	10.300.000,00	25%	25%	25%	25%	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	116.416.600,00					
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	8 Buku	100.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	5.819.600,00	9%	25%	66%		
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	10.597.000,00			19%	81%	
6	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana (%)	100%	1.885.286.100,00					
6.1	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	60 Orang	101.641.000,00			100%		
6.2		Jumlah Penanganan Kedaruratan	71 Kali	1.143.221.200,00	25%	25%	25%	25%	
6.3		Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	1 Tim	336.505.200,00	25%	25%	25%	25%	
6.4	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	192.228.000,00	50%		50%		
6.5		Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	60 Orang	111.690.700,00		100%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	83%	1.485.511.000,00					
7.1	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	107.768.000,00	25%	25%	25%	25%	
7.2		Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen	125.000.000,00			100%		
7.3		Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	28 Sekolah	120.000.000,00	20%	20%	40%	20%	
7.4		Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	1 Paket	130.000.000,00		100%			
7.4		Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	4 Sekolah/Madrasah	200.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
7.5	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	200.000.000,00	33%	33%	33%		
7.6		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	50 Paket	95.000.000,00		100%			
7.7		Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Piket Kesiapsiagaan Bencana	40 Orang	100.000.000,00	59%	13%	14%	14%	
7.8		Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	50 Meter	135.734.400,00	50%		50%		
7.9		Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk	1 Unit	272.008.600,00	25%	25%	25%	25%	
8	PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	87%	760.099.000,00					
8.1	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan	130.000.000,00		50%		50%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2		Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	70.000.000,00		100%			
8.3		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	1 Dokumen	65.000.000,00			100%		
8.4	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Unit	115.952.900,00			100%		
8.5		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Dokumen	166.787.300,00			100%		
8.6		Jumlah SDM Paham JITU PASNA	30 Orang	118.973.800,00		100%			
8.7		Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	93.385.000,00	100%				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, isi dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2020 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2020.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG

SANUSI